

BAB I

PENDAHULUAN

A. ALASAN PEMILIHAN JUDUL

Dalam pemilihan judul **“Strategi Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat Dalam Pemasaran Komoditas Mutiara ke Pasar Global”** ini, penulis memiliki beberapa alasan yaitu, bahwa bidang perdagangan saat ini merupakan sebuah cara yang handal untuk suatu negara agar dapat menjalin hubungan luar negeri dengan negara lain. Hal ini jauh lebih menguntungkan bila dibandingkan pada suatu topik atau permasalahan lain seperti halnya yang menyangkut permasalahan Politik, sosial dan HAM.

Bidang perdagangan pada umumnya juga dijadikan suatu aset untuk menggali pendapatan daerah yang bersifat komersial, seperti di negara-negara dan daerah-daerah lainnya dimana hasil-hasil potensi kekayaan alam dapat dijadikan aset yang bisa dijual sehingga dapat menghasilkan pendapatan tersendiri bagi daerah atau negara tersebut. Hal ini juga yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat, dimana Kabupaten tersebut memiliki sumber daya alam atau potensi daerah yang dapat dikatakan mempunyai nilai jual ekspor di bidang budidaya perikanan kerang laut

Untuk menunjang pemanfaatan potensi yang dimiliki Kabupaten Lombok Barat dibidang budidaya perikanan kerang laut perlu adanya strategi atau langkah-langkah yang harus dilakukan agar potensi tersebut dapat bersaing di pasar global. Apalagi dengan adanya kemajuan pembangunan yang meliputi kemajuan teknologi, komunikasi dan informasi sebagai salah satu penyebab semakin kecilnya batas suatu negara. Hal ini berakibat adanya persaingan global yang telah menghapus batas-batas negara dan menyebabkan produk-produk yang berasal dari belahan negara lain dapat masuk ke dalam wilayah negara lain.

Di samping itu bila dilihat dari pemberlakuan yang dilakukan oleh pemerintah dengan mengeluarkan Undang-Undang No.22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah yang secara efektif dilaksanakan pada tahun 2001, merupakan titik tolak yang sangat strategis bagi daerah (Kabupaten dan Kota) untuk dapat menggali, mengembangkan dan mengelola aset-aset maupun potensi sumber daya yang dimiliki serta pemberdayaan bagi pembangunan perekonomian setempat. Oleh karena itu daerah perlu mencermati sektor-sektor strategis yang memiliki potensi kuat untuk

Dengan adanya alasan-alasan tersebut diatas, penulis merasa perlu dan tertarik untuk mengangkat judul **“Strategi Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat Dalam Pemasaran Komoditas Mutiara ke Pasar Global”**.

B. TUJUAN PENULISAN

1. Penulis bertujuan memberikan penjelasan atas permasalahan yang ada guna memperoleh jawaban dengan teori yang relevan dan membuktikan hipotesa dengan fakta dan data.
2. Mengembangkan ilmu yang telah didapat selama dibangku kuliah dengan menetapkan metodologi yang sesuai dengan Ilmu Hubungan Internasional.
3. Untuk meneliti dan mengetahui mengenai bagaimana Strategi Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat Dalam Pemasaran Komoditas Mutiara ke Pasar Global.
4. Tujuan utama dari penulisan ini yaitu bahwa penulisan ini akan dijadikan skripsi sebagai syarat utama guna memperoleh gelar sarjana S-1 pada jurusan Ilmu Hubungan Internasional, fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

C. LATAR BELAKANG MASALAH

Salah satu perubahan penting yang terjadi pada tatanan kehidupan dan pola pemerintahan bangsa Indonesia yang ditandai dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 dan Undang

Undang No.25 Tahun 1999 merupakan titik awal berjalannya otonomi daerah, yaitu berupa reformasi pemerintahan daerah dan reformasi pengelolaan keuangan daerah di Indonesia. Misi utama dari kedua undang-undang tersebut adalah untuk menghasilkan dua manfaat, yaitu: pertama, mendorong peningkatan partisipasi, prakarsa, dan kreativitas masyarakat dalam pembangunan, serta mendorong pemerataan hasil-hasil pembangunan di seluruh daerah. Kedua, memperbaiki alokasi sumber daya produktif melalui pergeseran peran pengambilan keputusan publik ke tingkat pemerintah yang lebih rendah

Undang-undang No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah adalah salah satu landasan yuridis bagi pengembangan otonomi daerah di Indonesia. Dalam undang-undang ini disebutkan bahwa pengembangan otonomi pada daerah kabupaten dan kota diselenggarakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman Daerah.¹

Dengan demikian jelas bahwa pemerintah daerah mempunyai kewenangan yang mencakup seluruh bidang pemerintahan, dan pemerintah daerah berhak sepenuhnya untuk menentukan arah kebijakan untuk pelaksanaan pembangunan tanpa campur tangan dari pemerintah pusat.

¹ Mardiasmo, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Andi Yogyakarta, 2004, hal. 8

Dalam rangka untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, masing-masing daerah sering bertumpu pada masing-masing sektor yang menjadi andalan bagi daerah tersebut. Bagi sebagian daerah di Indonesia, sumber daya alam berupa hasil bumi dan objek pariwisata memegang peranan penting sebagai sektor andalan untuk menyokong pendapatan asli daerah. Karena telah terbukti dengan adanya sumber daya alam dan objek pariwisata pemasukan kas daerah semakin bertambah dalam bentuk retribusi daerah serta pajak.

Dari sekian banyak daerah yang memanfaatkan hasil kekayaan daerahnya, hanya beberapa daerah yang memanfaatkan Potensi sumber daya perikanan budidaya laut sebagai sumber pendapatan asli daerah. Dikarenakan daerah tersebut memiliki keunggulan tersendiri bila dibandingkan dengan beberapa potensi lainnya yang tidak dimiliki oleh daerah lain. Apalagi daerah tersebut merupakan daerah yang memiliki banyak potensi areal budidaya laut untuk komoditas mutiara yang dapat menjadi tumpuan dan harapan untuk dijadikan nilai jual bagi daerah tersebut serta dapat juga dijadikan sebagai komoditas ekspor yang sangat potensial.

Lombok Barat merupakan salah satu dari beberapa Kabupaten yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Mataram. Kabupaten Lombok Barat memiliki potensi alam yang bisa diandalkan. Termasuk diantaranya

yang paling terkenal oleh masyarakat lokal maupun internasional adalah objek wisata alam dan hasil budidaya mutiara.

Mutiara adalah salah satu komoditas andalan dari Kabupaten Lombok Barat. Benda bulat atau lonjong berwarna putih yang berasal dari kerang mutiara ini dibudidayakan lewat lahan 4.950 hektar dengan wilayah pengembangan di Kecamatan Pemenang, Tanjung, Gangga, dan Sekotong. Pemasaran benda laut yang proses pembentukannya makan waktu 2 samapai 4 tahun ini di arahkan lewat ekspor. Di mana nilai dari hasil penjualannya mencapai 173.600 dollar AS, dan Jepang merupakan salah satu negara tujuan ekspor yang membeli produk mutiara dalam bentuk butiran yang belum diolah. Sedangkan untuk pemasaran di dalam negeri sudah diolah menjadi perhiasan mutiara yang harganya cukup tinggi.²

Ditinjau dari aspek peluang pasar dan peluang bisnis mutiara, komoditas ini mempunyai peluang dan jangkauan pemasaran yang sangat luas, baik untuk memenuhi kebutuhan konsumen dalam negeri maupun konsumen luar negeri (ekspor). Masyarakat di Amerika Serikat dan Eropa Barat merupakan konsumen terbesar untuk mutiara bermutu, sehingga pasar mutiara dunia masih sangat terbuka. Demikian pula dengan negara jepang, yang merupakan salah satu pasar dunia untuk mutiara.

² http://www.kompas.com/ha/kabupatenlombokbarat/2002/04/02/ha-20020402_id.htm

Jepang merupakan negara yang memiliki pasar mutiara terbesar dan banyak di kunjungi oleh para konsumen mutiara dari luar negeri. Karena Jepang dianggap mempunyai teknologi tinggi dalam bidang kerajinan mutiara. Terlihat dari banyaknya permintaan para konsumen mutiara untuk memesan mutiara bermutu tinggi, sehingga jepang di jadikan pasar dunia untuk mutiara bermutu.

Seperti di ketahui mutiara NTB di pasar dunia dikenal sebagai “*South Sea Pearl*” (Mutiara Laut Selatan) yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif, memiliki keunikan, nilai magis serta nilai ekonomis yang tinggi. Sehingga apabila di jual di pasar jepang akan banyak dilirik oleh para konsumen mutiara dari luar negeri yang menginginkan mutiara yang bermutu.

Potensi dari perikanan laut yang berupa kerang mutiara ini tampaknya memiliki kemampuan produksi yang baik di masa yang akan datang. Terlihat dari produksi butir mutiara pada tahun 2005 tercatat sebesar 1,8 ton dengan nilai produksi sebesar Rp. 405.000.000. Produksi butir mutiara pada tahun 2001 sampai dengan 2005 dapat dilihat pada tabel dibawah ini. Tabel Jumlah Produksi Mutiara Menurut Kabupaten / Kota Se – Nusa Tenggara Barat Tahun 2001 s/d 2005,³ sebagai berikut :

³ <http://www.diskanlut->

[ntb.web.id/index.php?option=com_content&task=view&id=20&Itemid=71](http://www.diskanlut-ntb.web.id/index.php?option=com_content&task=view&id=20&Itemid=71)

Tabel No. 1.1
Jumlah Produksi Mutiara Kabupaten Nusa Tenggara Barat
Tahun 2001 s/d 2005

No.	KABUPATEN / KOTA	JUMLAH PRODUKSI (TON)				
		2001	2002	2003	2004	2005
1.	Lombok Barat	0,1920	0,114	0,300	0,300	0,400
2.	Lombok Tengah	-	-	-	0	0,000
3.	Lombok Timur	0,1600	0,030	0,050	0,070	0,225
4.	Sumbawa	0,2560	0,650	0,360	0,220	0,600
5.	Dompu	0,0320	0,227	0,034	0,034	0,0075
6.	Bima	0,1280	0,325	0,473	0,047	0,300
7.	Kota Mataram	-	-	-	-	-
8.	Kota Bima	-	-	-	-	-
9.	Sumbawa Barat					0,200
	Se - NTB	0,7680	1,346	1,217	0,700	1.800

Sumber : Statistik Perikanan Budidaya Dinas Perikanan & Kelautan NTB, 2005

Di dalam pengelolaan potensi areal budidaya laut untuk komoditas mutiara di Kabupaten Lombok Barat, terdapat dua kelompok pengusaha yang memiliki peranan yang besar dalam mengeksploitasi hasil sumber daya alam yang berupa mutiara. Dua kelompok yang dimaksud disini adalah kelompok pengusaha yang bersifat swasta nasional dan kelompok pengusaha yang bersifat pemilik modal asing, yang mana keduanya memiliki kemampuan di dalam melakukan kegiatan ekspor mutiara. Namun yang sudah mampu dan eksis dalam melakukan ekspor secara terus-menerus baru pada perusahaan yang bersifat pemilik modal asing, hal ini dikarenakan perusahaan tersebut sudah memiliki jalur pemasarannya sendiri ke luar negeri. Sedangkan pengusaha yang

bersifat swasta nasional dalam mele
dalam pencarian akses ekspornya, l
agen-agen pemasaran swasta.

Sektor perikanan merupakan
mampu bertahan di tengah krisis na
dalamnya sektor perikanan kerang
perikanan ditingkatkan, maka devisa ya
besar.

Pemerintah perlu membuat dan
perikanan yang jelas dan sistematis un
khususnya perikanan budidaya kerang
pembangunan diarahkan pada kegiatan
sumber daya darat. Padahal di negara-ne
Taiwan, Korea, dan di Eropa, seperti M
kelautan memberikan kontribusi pada pe
%.⁴

Pengembangan ekspor pada sekt
budidaya laut mutiara membutuhkan du
pengembangan sumber daya kerang m
produksi, teknologi pasca panen, dan bidar

⁴ Centre for Political Studies Soegeng Sriadi Sudiarta, *OT*

sektor perikanan budidaya laut kerang mutiara. Aspek lainnya meliputi sarana dan prasarana, keuangan, hukum dan kelembagaan, serta sumber daya manusia dan IPTEK.⁵

Lantas, bagaimana peran dan posisi Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dalam hal ini Departemen Perindustrian dan Perdagangan serta Departemen Perikanan dan Kelautan, untuk menghadapi pasar global, tentunya dengan melihat kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunity*), dan tantangan atau ancaman (*threat*) ke depan, baik dari aspek ketersediaan sumber daya alam (SDA) dan kualitas sumberdaya manusia (SDM). Kabupaten Lombok Barat harus bisa menjadi aktor aktif bahkan proaktif, sehingga mampu berimprovisasi secara lincah dalam pasar global. Di pasar global tentunya Kabupaten Lombok Barat bisa menunjukkan eksistensi dalam arti bukan hanya jadi penyeimbang saja tetapi lebih dari itu mampu menjadi pelaku dalam percaturan dan persaingan perekonomian global terutama dalam AFTA juga APEC pada 2010 mendatang.

Apalagi dengan kedudukan Kabupaten Lombok Barat yang semakin strategis dalam posisi finansial Nusa Tenggara Barat dan memiliki infrastruktur relatif baik dibanding kabupaten lainnya, salah satu kelebihan yang dimiliki yaitu dengan adanya Pelabuhan Lembar.

Dimana lewat pelabuhan tersebut secara tidak langsung merupakan pintu keluar masuknya arus transaksi barang-barang sehingga tercipta hubungan bisnis dan perdagangan yang baik dalam konteks perdagangan antar pulau dan luar negeri sekalipun. Ke depannya bagaimana Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat bekerja keras memantapkan perannya sebagai pembuat dan pelaksana kebijakan politik agar Kabupaten Lombok Barat dapat Lebih maju dari kabupaten lainnya di Nusa Tenggara Barat.

D. POKOK PERMASALAHAN

Masalah adalah suatu kesulitan yang ditemui dan dihadapi oleh semua manusia dan untuk mengatasinya diperlukan cara atau jalan keluar. Dari Latar Belakang Masalah diatas, maka penulis merumuskan masalah yang diharapkan dapat menjawab melalui penelitian ini. Adapun Pokok Permasalahan tersebut adalah :

Bagaimana strategi Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat dalam pengembangan ekspor mutiara ke pasar mutiara Jepang?

E. KERANGKA DASAR PEMIKIRAN

Teori berfungsi untuk memahami serta memberikan hipotesa terhadap fenomena yang ada. Tanpa menggunakan teori, maka fenomena-fenomenanya serta data-data yang ada akan sulit dipahami. disisi lain

teori juga dapat berupa sebuah bentuk penyertaan yang menghubungkan konsep-konsep secara logis.⁶

Pengertian dari teori itu sendiri adalah sebagai suatu perangkat yang terintegrasi secara sintaksis yaitu yang mengikuti aturan-aturan tertentu yang dikembangkan secara logis satu dengan yang lainnya dengan data dasar sehingga dapat diamati dan berfungsi sebagai bahan untuk menjelaskan yang dapat diamati.⁷

Untuk menjelaskan permasalahan mengenai “Bagaimana strategi pemerintah kabupaten Lombok Barat dalam pengembangan ekspor mutiara ke pasar mutiara Jepang”, maka dalam penulisan skripsi penulis menggunakan Teori Kebijakan Publik, Teori Keunggulan Kompetitif, serta Teori Kerjasama Internasional sebagai kerangka dasar pemikiran. Dengan tujuan agar dapat menggambarkan secara teoritis penulisan ini.

1. Teori Kebijakan Publik

Kebijakan publik menurut Thomas R. Dye adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan dan tidak dilakukan, bahwa kebijakan publik itu mencakup hal-hal yang diputuskan pemerintah untuk tidak dikerjakan atau dibiarkan. Dari definisi ini mengandung makna bahwa 1). Kebijakan publik dibuat oleh badan pemerintah bukan badan organisasi swasta. 2). Kebijakan publik menyangkut

⁶ Jack C. Blynn, *The International Relations Dictionary*, Santa Barbara, California, 1993, hal. 7

pilihan yang harus dilakukan atau tidak dilakukan oleh badan pemerintah.⁸

Sedangkan Chochran dan Malone mendefinisikan kebijakan publik sebagai suatu kajian terhadap keputusan-keputusan dan aksi-aksi pemerintah yang didesain untuk mengatasi masalah yang berkenaan dengan publik. Kebijakan publik terdiri dari keputusan politis dalam mengimplementasikan program-program dalam rangka mencapai tujuan sosial masyarakat. Keputusan-keputusan ini kemudian diharapkan mempresentasikan sebuah konsensus nilai. Kebijakan publik terdiri dari serangkaian rencana kerja atau program dan tujuan secara tertulis yang memberikan gambaran tentang apa yang ingin kita capai dengan "sebuah kebijakan". Tujuan itu juga menggambarkan tentang "apa dan siapa" yang akan terkena dampak (merasakan efek) dari kebijakan yang diambil oleh pemerintah.⁹

Dapat disimpulkan bahwa dalam prakteknya memang kebijakan publik dapat saja dipengaruhi oleh para aktor dan faktor-faktor lain di luar pemerintah. Akan tetapi berbicara mengenai kebijakan publik maka kita tidak akan lepas dari pembicaraan mengenai serangkaian aktifitas yang dilakukan oleh pemerintah dalam menjalankan

⁸ Thomas R. Dye, *Understanding Public Policy*, (New Jersey : Prentice Hall, 1981) hal. 1

fungsinya, serta maksud dan keputusan politis yang mempengaruhi dibalik aktifitas serta keputusan tersebut.

Dari penjelasan di atas dapat penulis simpulkan bahwa, kebijakan publik merupakan suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah, dimana dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat yang telah membuat kebijakan yang berupa strategi untuk memasarkan komoditas mutiara ke pasar global. Tujuan dari pembuatan kebijakan ini dimaksudkan untuk membantu pengusaha lokal dalam mengembangkan ekspor mutiaranya ke pasar Jepang. Dengan dibuatnya kebijakan publik tersebut secara langsung dapat memberikan kontribusi tersendiri kepada masyarakat khususnya bagi para pengusaha mutiara lokal yang saat ini tengah mengembangkan ekspor mutiara. Sehingga, dengan adanya strategi dari pemerintah, para pengusaha lokal dapat bersaing dengan para pengusaha yang bersifat PMA (Pemilik Modal Asing) yang dimana PMA tersebut sudah mempunyai jalur pemasaran sendiri. Disamping memberikan kemudahan bagi para pengusaha lokal, juga kebijakan tersebut dapat memberikan kontribusi yang positif bagi pemasukan pendapatan asli daerah (PAD) Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dan khususnya bagi Provinsi NTB.

Kebijakan pemerintah dalam hal ini strategi pemerintah daerah Kabupaten Lombok Barat dalam mengembangkan ekspor mutiara ke

pasar mutiara Jepang dibuat oleh Pemerintah Provinsi NTB dalam hal ini Dinas Perikanan dan kelautan serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan, dimana kebijakan tersebut juga dipengaruhi oleh external kebijakan atau dengan kata lain yang bergerak diluar instansi pemerintah seperti Asosiasi Budidaya Mutiara Indonesia (ASBUMI). Faktor-faktor yang mempengaruhi terbentuknya kebijakan tersebut adalah ingin mengembangkan pemasaran mutiara yang semula ruang lingkupnya hanya pada pameran Internasional yang diselenggarakan di beberapa kota yang ada di Indonesia, namun dengan dibuatnya kebijakan tersebut diharapkan para pengusaha mutiara dapat melebarkan usaha atau pemasarannya dengan mengikuti pameran yang diselenggarakan di luar negeri seperti halnya di Negara Jepang. Selain itu juga diharapkan bagi pemerintah untuk tetap fokus memberikan perhatiannya kepada pemasaran ekspor mutiara, karena selama ini pemerintah hanya sebagai fasilitator dalam setiap kegiatan pemasaran mutiara, namun diharapkan dengan adanya kebijakan tersebut pemerintah dapat memberikan kontribusi yang lebih dengan ikut membantu mengembangkan pemasaran mutiara sehingga dapat menambah pendapatan asli daerah yang berasal dari pemasaran ekspor mutiara.

Dalam merumuskan kebijakan publik ada sudut pandang yang

secara implisit harus diperhatikan yaitu bahwa pemerintah

kesejahteraan merupakan hal yang sangat penting. Keinginan untuk memperbaiki sistem yang tersedia merupakan basis bagi kebijakan publik. Oleh karena itu untuk mencapai tujuan tersebut maka kebijakan publik mempunyai proses-proses penyusunan ke dalam beberapa tahap. Seperti misalnya, tahap penilaian kebijakan seperti yang tercantum dalam bagan dibawah ini.¹⁰

Gambar 1.1
Tahap-Tahap Kebijakan Publik.



a. Tahap penyusunan agenda

Bila dilihat dari penelitian yang penulis lakukan terlihat ada permasalahan yang muncul pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat khususnya Dinas Perikanan dan Kelautan serta Dinas Perindustrian dan perdagangan yang dimana kedua dinas

¹⁰ Charles Lindbloom, *Process of Government: Public Policy Making*, edisi kedua, Dana Pustaka, Bandung, Sumendia

tersebut belum memiliki strategi didalam memasarkan mutiara ke luar negeri. Atas dasar tersebut sehingga penulis dapat menyimpulkan agar pemerintah Kabupaten lombok Barat mengangkat para pejabat yang berkompeten dalam hal ekspor mutiara sehingga dapat merumuskan dan menempatkan masalah pada agenda publik yang mana pada akhirnya akan menjadi sebuah kebijakan publik yang berupa strategi pemerintah dalam pengembangan ekspor mutiara.

b. Tahap Formulasi kebijakan

Masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif yang ada. sama halnya dengan perjuangan suatu masalah untuk masuk kedalam agenda kebijakan, dalam tahap perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah. Pada tahap ini, masing-masing aktor akan bermain untuk mengusulkan pemecahan masalah terbaik.

c. Tahap adopsi kebijakan

Dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para pembuat kebijakan pada akhirnya salah satu dari

alternatif kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus antara direktur lembaga atau keputusan peradilan.

d. Tahap implementasi kebijakan

Suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan elit, jika program tersebut tidak diimplementasikan. Oleh karena itu, program kebijakan yang telah diambil sebagai alternatif pemecahan masalah harus diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumberdaya finansial dan manusia. Pada tahap implementasi ini berbagai kepentingan akan saling bersaing. Beberapa implementasi kebijakan mendapat dukungan para pelaksana, namun beberapa yang lain mungkin akan ditentang oleh para pelaksana.

e. Tahap penilaian kebijakan publik.

Pada tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat telah mampu memecahkan masalah. Kebijakan publik pada dasarnya dibuat untuk meraih dampak yang diinginkan. Dalam hal ini, memperbaiki masalah yang dihadapi masyarakat. Oleh karena itu, ditentukanlah ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan publik telah meraih

2. Teori Keunggulan Kompetitif

High Mosley dan Gunter Schmid (dalam Philip Kotler, Somhid Jatusriptak, Suvit Mausancea), *The Marketing of Nation : A Strategic Approach to Building National Wealth*, "bahwa daya saing suatu negara terdiri dari daya mikronya dan daya saing internasionalnya".¹¹ Daya saing mikro (keunggulan kompetitif) adalah kemampuan perusahaan-perusahaan domestik untuk meningkatkan penjualan produk-produk ekspornya dalam perdagangan internasional, berdasarkan daya saing dan daya tarik relatif dari harga mutunya dibandingkan dengan pesaing-pesaing mereka, suatu negara akan meningkatkan daya saing mereka apabila memiliki keunggulan kompetitif sehingga mampu menguasai harga pasar yang ada.

Di satu pihak, daya saing pihak internasional suatu negara (keunggulan kompetitif) menunjuk pada kemampuannya untuk mencapai penghasilan faktor-faktor dalam perekonomian global, bila suatu bangsa bersaing berdasarkan keunggulan tenaga yang murah, negara tersebut harus mempertahankan agar tingkat upah dan kondisi hidup tenaga kerjanya yang selalu rendah.

¹¹ Philip Kotler, Somhid Jatusriptak, Suvit Mausancea, *The Marketing of Nation : A Strategic Approach to Building National Wealth*, PT. Prehalindo, Jakarta, 1998, hal. 166.

Keunggulan mutiara Kabupaten Lombok Barat dapat dilihat dari jenis bibit mutiara (nukleus) yang digunakan memiliki keunggulan teknologi tinggi sehingga mutu mutiara yang dihasilkan bersifat unggul.

Karena tujuannya bukanlah semata-mata ikut serta dalam perdagangan internasional, tetapi ikut serta dalam tingkat ekspor atas dasar keunggulan produktifitas yang dihasilkan, pelayanan dan mutu produktifitas tersebut. Industri budidaya mutiara Indonesia akan mengembangkan faktor-faktor ekspor ke pasaran internasional dengan produktifitas ekspor yang mempunyai keunggulan kompetitif.

Apabila kita melihat usulan Mosley dan Gunter tentang daya saing dengan suatu negara atau suatu bangsa dalam hal ini langkah strategis suatu negara untuk menguasai dan dapat diterima pasar suatu negara yang akan dituju. Maka industri mutiara dalam hal ini perlu mengembangkan dan memperbaiki mutu keunggulan produk mutiaranya agar apabila diekspor mempunyai daya saing yang tinggi.

3. Teori Kerjasama Internasional

Berkaitan dengan pengertian kerjasama internasional, Padelford dan Lincoln dalam pernyataannya menegaskan pentingnya kerjasama internasional di dalam wadah organisasi internasional.

"The roots of cooperation in international organization line in awareness of some area of common interest and agreed purpose,

which the panies belive can be futhured to better advantage by having an organization or mechanism than by not having done”¹².

Akar-akar dari kerjasama dalam organisasi internasional terletak pada kesadaran terhadap adanya kepentingan-kepentingan bersama dan tujuan-tujuan yang telah disepakati, dimana masing-masing pihak yang bersangkutan, percaya akan dapat keuntungan yang lebih baik dengan memiliki organisasi atau mekanisme dari pada tidak melakukan kerjasama.

Mengingat yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten Lombok Barat dalam usaha pemasaran tidak memungkinkan untuk melakukan segala sesuatunya sendiri, seperti masalah promosi sangatlah tidak mungkin dilakukan secara efektif oleh pemerintah daerah. Seringkali pemerintah daerah mengakui bahwa mereka tidak memiliki kepiawaian dalam pemasaran yang dibutuhkan karena tidak memahami betul kebutuhan pelanggan; tidak mengetahui bagaimana mempromosikan produk secara efektif.

Langkah pertama yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten Lombok Barat dalam melakukan kerjasama dengan pihak luar adalah dengan cara menyeleksi calon rekanan atau mitra strategis

¹² Noman Y. Badaloff and A. V. ...

yang dapat diandalkan dalam kerjasama karena menyangkut pada dimensi inti yang saling berkaitan yaitu:

- a. Keselarasan tujuan: tujuan kedua belah pihak cocok satu sama lain sebatas tujuan aliansi maupun tujuan kedua belah pihak dapat tercapai.
- b. Keunggulan strategis: harus terdapat manfaat yang dirasakan kedua belah pihak.
- c. Saling menguntungkan: setiap mitra tergantung satu sama lain dan hubungan ini harus dikelola sehingga konflik dibatasi seminimal mungkin sedangkan kerjasama berjalan dengan baik.
- d. Komitmen: kepercayaan adalah krusial bagi kelangsungan hidup jangka panjang sebuah aliansi dan vital bagi kelangsungan itikat relasional yang mendasari komitmen diantara mitra-mitra aliansi.¹³

Dengan adanya langkah efektif dalam melakukan kerjasama dengan pihak luar serta adanya kebijakan perdagangan yang dimiliki oleh negara, maka setiap kelompok usaha dan pengerajin mutiara harus berusaha untuk menerapkan strategi dalam memasarkan produknya. Dengan dijelaskan bagaimana cara kelompok usaha dan pengerajin mutiara memasuki pasar global dan cara mereka

¹³ Simanungkalot, Hery, Manajemen Bisnis, 2011, hal. 113-114

menambah volume ekspor serta menambah jumlah produksi dan menaikkan hasil penjualan.

Para kelompok usaha dan pengerajin mutiara bersaing dalam menerapkan strateginya yang berbeda-beda. Dengan strategi yang tepat, maka input yang didapat yang didapat akan bertambah. Oleh karena itu sebelum memasuki pasar global, kelompok usaha dan para pengerajin kerang mutiara harus bisa melihat kondisi pasar yang hendak dimasukinya dengan baik, agar hasil produksinya membawa keuntungan.

Dalam strategi yang dipakainya, mereka berusaha dengan cara antara lain: meningkatkan mutu dan kualitas produk dengan cara memberikan cairan nucleus yang berkualitas baik agar dapat menghasilkan mutiara yang bermutu tinggi. Dengan adanya perkembangan teknologi yang sangat pesat menyebabkan iklim persaingan antara kelompok usaha dan pengerajin mutiara semakin ketat, sehingga mereka harus mengerti tentang keinginan konsumen. Dalam hal ini mereka harus melewati aturan-aturan oleh negara yang dituju. Peran pemerintah daerah dalam hal ini departemen perindustrian dan perdagangan merupakan sarana atau alat untuk menembus perdagangan internasional

F. HIPOTESA

Strategi Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat dalam pengembangan ekspor mutiara ke pasar mutiara Jepang adalah dengan cara melakukan kerjasama dan membuat perencanaan-perencanaan yang strategis di era perdagangan bebas ini, seperti :

1. Kebijakan dalam meningkatkan mutu dan keunggulan mutiara.
2. Kebijakan perikanan yang sistematis untuk membangun sektor ekspor perikanan budidaya mutiara.
3. Kerjasama internasional dalam usaha mempromosikan mutiara, sehingga mempunyai akses kepada saluran distribusi yang benar.

G. JANGKAUAN PENELITIAN

Untuk memudah penelitian dan menghindari penulisan yang meluas serta kesulitan dalam mencari data, maka salah satu caranya adalah penulis akan membatasi atau menyempit permasalahan, yang diaplikasikan dalam jangkauan penelitian. Dalam penulisan ini, penulis ingin menitik beratkan pada strategi Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat Selama Periode 2004-2007 dalam Dalam Demagoran

H. METODE PENGUMPULAN DATA

Seperti lazimnya kegiatan suatu penelitian pada umumnya, maka penelitian tentang strategi perdagangan Internasional, studi tentang Strategi Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat Dalam Pemasaran Komoditas Mutiara ke Pasar Global menggunakan metode-metode sehingga penelitian ini akan dapat lebih dikatakan sebuah penelitian yang ilmiah. Metode penelitian memandu peneliti tentang urutan-urutan bagaimana penelitian dilakukan.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian deskriptif. Dimana penelitian deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Penelitian deskriptif mempunyai ciri-ciri:

- a. Memusatkan diri pada pemecahan masalah-masalah yang ada pada masa sekarang, pada masalah-masalah yang aktual.
- b. Data yang dikumpulkan mula-mula disusun, kemudian dianalisa.¹⁴

Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis,

¹⁴ Winarno Surakhmad, *Pengantar Metodologi Ilmiah*, Teasite, Bandung, 1992, hal. 102

faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.¹⁵

Berkenaan dengan itu penelitian ini mencoba untuk menggambarkan tentang Strategi Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat Dalam Pemasaran Komoditas Mutiara ke Pasar Global. Juga, penelitian ini mencoba melihat secara jelas dan objektif permasalahan-permasalahan yang muncul dari strategi yang diambil oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat dalam mengembangkan ekspor mutiara agar dapat mampu bersaing dalam pasar mutiara jepang dengan mengkaji fakta dan data-data real yang diambil langsung dari instansi pemerintah dan masyarakat dalam hal ini sebagai pengusaha mutiara.

2. Data yang dibutuhkan

Adapun yang diperlukan untuk memahami pokok-pokok masalah yang diteliti meliputi :

a. Data primer

Yaitu data yang diperoleh langsung dari responden berupa keterangan pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang ada dalam penelitian ini. Pihak-pihak tersebut adalah Pemerintah Daerah

¹⁵ *Yahya, N. (1996). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.*

Kabupaten Lombok Barat, Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta masyarakat selaku pengusaha mutiara.

Dan untuk mendukung kelengkapan data yang dibutuhkan, diperlukan dua cara dalam teknik pengumpulan data tersebut, antara lain :

1) Observasi

Yaitu mengadakan pengamatan langsung di lokasi penelitian yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Yakni di Kecamatan Pemenang, Tanjung, Gangga, dan Sekotong yang merupakan lokasi pembudidayaan kerang mutiara.

2) Interview (wawancara)

Yaitu interaksi yang terjadi secara langsung dengan responden untuk memperoleh data yang berkaitan dengan penelitian kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat, serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

b. Data Sekunder

Data sekunder bisa juga disebut data tidak langsung karena data ini bisa didapat dari

pandangan para pengamat, buku-buku ilmiah, data statistik, media massa dan dokumen-dokumen.

Dan untuk mendukung kelengkapan data yang dibutuhkan, diperlukan cara dalam teknik pengumpulan data tersebut, yaitu melalui :

1) Dokumentasi

Merupakan bahan-bahan tertulis yang mendukung kelengkapan data dari objek penelitian, seperti surat kabar, buku, dokumen pemerintah, undang-undang dan lain-lain. Dokumen yang dibutuhkan dalam penelitian ini berupa catatan atau arsip yang terdapat di beberapa instansi, seperti Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat, serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

3. Teknik Analisis Data

Teknik analisa data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah analisa kualitatif. Dimana menurut Koentjaraningrat, "Apabila data yang dikumpulkan itu hanya sedikit, bersifat monografis atau berwujud kasus-kasus (sehingga dapat diuraikan

dalam struktur klasifikasi) maka analisa data yang digunakan adalah analisa kualitatif'.¹⁶

Dalam menganalisa penelitian ini, penulis berusaha menginterpretasikan fenomena-fenomena yang muncul atau terjadi dari data-data yang ada atau terkumpul. Sehingga dari intepretasi ini dapat memberikan suatu deskripsi atau gambaran mengenai masalah yang diteliti. Dalam teknik analisis data ini penulis mencoba melakukannya dengan cara membuat pengklasifikasian yang dimaksudkan untuk mempermudah penulis dalam menganalisa permasalahan secara sistematis. Adapun wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini dimaksudkan untuk memperkaya data dan analisis dalam kajian yang dilakukan.

I. SISTEMATIKA PENULISAN

Dalam skripsi ini terdiri dari 5 bab dan pembahsan dalam setiap bab akan dijabarkan lebih rinci ke dalam sub-sub bab. Pembahasan yang terkandung dalam bab satu dengan yang lain saling berhubungan, sehingga pada akhirnya nanti akan membentuk karya tulis yang runtut dan sistematis. Adapun sistematika penulisan-penulisannya adalah sebagai berikut :

¹⁶ *Kontinuitas Metode Metode Penelitian* karya Prof. Dr. G. M. Djoko, Jakarta, 1991, hal. 228

Bab I, merupakan bab pendahuluan yang memuat uraian tentang alasan pemilihan judul, tujuan penulisan, latar belakang masalah, perumusan masalah, kerangka dasar teori, hipotesa, jangkauan penelitian, metode pengumpulan data, dan sistematika penulisan.

Bab II, akan memaparkan tentang globalisasi perdagangan mutiara. Pembahasan ini akan menguraikan tentang sejarah globalisasi hingga pada bentuk-bentuk implikasi dari globalisasi itu sendiri.

Bab III, membahas tentang pembudidayaan kerang mutiara di kabupaten Lombok Barat dan aspek pemasarannya. mulai dari profil Kabupaten Lombok Barat, berbagai macam potensi dan tingkat pemanfaatannya, serta pengembangan usaha.

Bab IV, pada bab ini, penulis akan membahas mengenai strategi Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat dalam pengembangan ekspor mutiara ke pasar Jepang.

Bab V, merupakan kesimpulan yang ditarik dari keseluruhan dan analisis bab-bab sebelumnya dan kemudian dilanjutkan dengan daftar